

**PENGUNAAN TANAH WAKAF UNTUK
PEMAKAMAN UMUM SEBAGAI LAHAN PERTANIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi kasus di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai
Barat, Kabupaten Lampung Utara)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Heni Wati
NPM : 1421030022**

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PENGUNAAN TANAH WAKAF UNTUK
PEMAKAMAN UMUM SEBAGAI LAHAN PERTANIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi kasus di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai
Barat, Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



**Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Tanah Pemakaman di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara adalah tanah milik salah satu warga desa. Pada mulanya tanah ini digunakan untuk pemakaman keluarga. Melihat akan banyaknya warga yang meminta izin untuk dimakamkan ditanah ini, akhirnya pemilik tanah mewakafkan tanah ini sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU). Tanah pemakaman ini cukup luas sehingga pegurus pemakaman berinisiatif untuk mengelola tanah tersebut dengan ditanami singkong, dan hasil penjualan dianggap sebagai upahnya dalam mengurus TPU tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan tanah pemakaman umum sebagai lahan pertanian dan bagaimana penggunaan tanah pemakaman umum sebagai lahan pertanian perspektif hukum Islam dan hukum positif di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan tanah pemakaman umum sebagai lahan pertanian dan untuk mengetahui penggunaan tanah pemakaman umum sebagai lahan pertanian perspektif hukum Islam dan hukum Positif di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya dalam mengkaji suatu pengelolaan tanah wakaf dengan konsep hukum Islam dan hukum Positif untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan tehnik wawancara dan observasi langsung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Tanah Pemakaman Umum di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara belum terdaftar di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) belum ada *nazhir* yang mengurus dan mengelola secara khusus, menyebabkan

warga yang belum paham dengan pengelolaan tanah wakaf mengelolanya. Menurut hukum Islam penggunaan tanah pemakaman umum sebagai lahan pertanian itu diperbolehkan selama tidak merusak fungsi utamanya yaitu sebagai tempat pemakaman, dan hasil dari pengelolaan tanah digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, sarana ibadah, fakir miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial. Sedangkan menurut Hukum Positif/Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) dan (2), pengurus/pengelola harta wakaf tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan perubahan inipun dilakukan jika tanah wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun yang terjadi di desa Gunung Raja, tanpa menghilangkan fungsi utama yaitu sebagai pemakaman tanah tersebut dikelola juga sebagai lahan pertanian dan ini juga sudah mendapat persetujuan dari beberapa warga yang ada di desa.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarama Telp.Fax. (0721)703289 Bandar
Lampung 35131*

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Heni Wati
NPM : 1421030022
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292800031001

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp.Fax. (0721)703289 Bandar
Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, di susun oleh Heni Wati Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Selasa, 27 Februari 2018.

Ketua : Drs.H.Khoirul Abror,M.H.

Sekretaris : Ahmad Sukandi,S.H.I.,M.H.I.

(.....)

Penguji I : H.A.Khumaidi Ja'far,S.Ag.,M.H.(.....)

Penguji II : Marwin,S.H.,M.H.

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsvah, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197009011997031002**

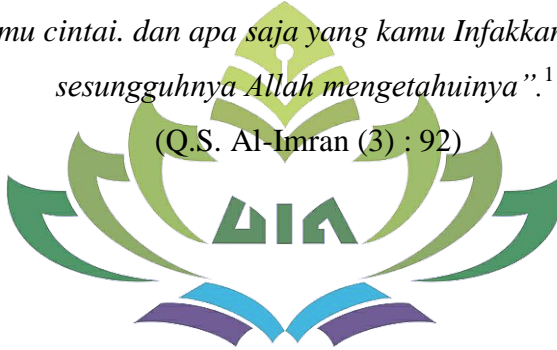
MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu Infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*¹

(Q.S. Al-Imran (3) : 92)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 62.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayangi serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Tarwin dan ibunda Ciknona yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih tak terhingga sampai menuntunku pada tahap ini.
2. Kakakku Hosi putri yana, Ria domes, Arman sahmega, Dewi puspita sari, dan adikku Diki saputra terimakasih atas motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayang serta semangat yang kalian berikan.

RIWAYAT HIDUP

Henri Wati lahir di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 17 Desember 1995. Terlahir dari pasangan Bpk. Tarwin dan Ny. Ciknona. Anak ketiga dari empat bersaudara.

Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Raja pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungkai Selatan pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lampung Utara pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi Kasus di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para Sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Marwin, S.H., M.H, selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Tim Penguji Skripsi Drs. H. Khoirul Abror, M.H., selaku ketua sidang, H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H., selaku penguji I, Marwin, S.H.,M.H., selaku penguji II, Ahmad Sukandi, S.H.I.,M.H.I., selaku sekretaris sidang munaqosah.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah serta segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung;
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat-sahabatku Tubriyani, Shinta Bela, Anis Juliana Sari, Siti Nur'aini, Putri Mentari, Resti Yustisia, Desi Nurlaila,

Dewi Nurlaili yang telah memberikan motivasi serta dukungan selama ini;

9. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2014, khususnya Muamalah kelas A;

10. Rekan-rekan KKN kelompok 91 di Desa Bangunan, Kecamatan Palas Lampung Selatan;

11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar

Lampung,

.....2018

Penulis,

Heni Wati

NPM.

1421030022

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf dalam Hukum Islam.....	14
1. Pengertian wakaf dan Dasar Hukum Wakaf.....	14
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	21
3. Macam-macam Wakaf.....	29
4. Kedudukan dan Perubahan Wakaf.....	30
5. Pemberdayaan Tanah Wakaf dalam Hukum Islam.....	34
B. Wakaf Menurut Undang-undang di Indonesia ...	36
1. Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004	36
2. Unsur dan Syarat Wakaf	39

3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	50
--	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	55
1. Profil Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara	55
2. Sejarah Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum di Desa Gunung raja.....	65
B. Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian di Desa Gunung Raja.....	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam	69
B. Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Positif	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sejarah singkat yang menjadi Kepala Desa Gunung Raja	57
2. Luas Desa Menurut Penggunaan Tanah	59
3. Jumlah Penduduk	59
4. Tempat Ibadah	60
5. Agama	61
6. Taman Kanak-Kanak	61
7. Sekolah Dasar (SD)	62
8. Prasarana Kesehatan	62
9. Tenaga Kesehatan	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Berita Acara Seminar Proposal
2. Surat Izin Penelitian/Survei Kesbangpol Provinsi Bandar Lampung
3. Surat Izin Penelitian/Survei Kesbangpol Lampung Utara
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengelola Tanah Pemakaman Umum
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan.

Skripsi ini berjudul “Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi Kasus di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara), adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.¹

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.²

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Pemakaman Umum merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 446.

² *Ibid.*, h. 1390.

³ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 29.

dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya.⁴

Lahan Pertanian adalah lahan yang ditunjukkan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman.⁵

Perspektif adalah sudut pandang: pandangan,⁶ tinjauan pembahasan dan analisis.⁷ Perspektif dalam skripsi ini adalah tinjauan dalam hukum Islam dan hukum Positif.

Hukum Islam yang dimaksud hukum Islam disini adalah hukum bisnis syariah atau fiqh muamalah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang di ambil dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bidang kegiatan ekonomi.⁸

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini disuatu negara, dalam hal ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang dalam suatu masyarakat tertentu bagi daerah tertentu.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah proses penggunaan tanah wakaf sebagai tempat pemakaman dijadikan lahan pertanian dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif yang berlokasi di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara.

⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit.*, h. 956.

⁶ *Ibid.*, h. 1062.

⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991), h. 691.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

⁹ Irwantoni, *Buku Daras: Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Puskima Fakultas Usuluddin, 2009), h. 101.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Melihat kasus ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat desa tersebut, apakah pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman ini diperbolehkan dalam Islam dan hukum positif. Lebih spesifiknya pada penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut.

Banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah, perolehan dan peralihan hak atas tanah, dalam hukum Islam dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, *ihya-ulmawat* (membuka tanah baru).¹⁰ Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam sudah mengenal lembaga wakaf. Tujuan pokok yang menjadi *common basic idie* wakaf sebagai salah

¹⁰ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 3.

satu lembaga keagamaan Islam, bermaksud sebagai sarana pendukung pengembangan kehidupan keagamaan.¹¹

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, seperti yang terjadi di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, tanah wakaf untuk pemakaman umum dijadikan sebagai lahan pertanian oleh warga desa. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* (penerima wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹²

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka dibentuk Undang-Undang tentang wakaf sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.¹³

Pemberdayaan wakaf di Indonesia dilihat dari jumlahnya, harta wakaf diseluruh tanah air terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, pekuburan dan lain-lain yang rata-rata tidak produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan Syari'at Islam dibawah koordinasi Badan

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 118.

¹² *Ibid.*, h. 121.

¹³ Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf Indonesia (BWI).¹⁴ Pemberdayaan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanah Pemakaman adalah termasuk jenis tanah wakaf yang pada dasarnya tanah wakaf itu bisa diproduktifkan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang disertai tugas oleh *wakif* (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan *nazhir* (penerima wakaf) sebagai salah satu rukun wakaf.¹⁵ Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *nazhir* profesional sangat dibutuhkan, sebab dipundak *nazhir* tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.¹⁶

Kebiasaan memandang harta wakaf sebagai amal saleh dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh siapa saja, sehingga terkadang menyebabkan permasalahan dalam masyarakat. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قُطْهُوَ نَفْسٍ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَ

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 97.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 37.

¹⁶ *Ibid*.

تَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ، إِنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُؤْتَى وَلَا تُورَثُ. قَالَ
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.¹⁷
(رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khibar, kemudian menghadap kepada Rasullallah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasullallah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasullallah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya pada orang- orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.(H.R. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah di Khibar dan beliau menghadap Rasul SAW untuk memohon petunjuk. Lalu Rasul SAW menjawab sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqaha, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan dijalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk Ibnu Sabil. Orang yang mengurusnya, tidak mengapa apabila ia makan sebagian

¹⁷ Al-Imam Abiy Zakaria Yahya Ibnu Syarofi Al-Nawawiy Al-Damsyiqiy, *Syarh Shahih Muslim*, ditahqiq oleh Imad Zakiy Al-Barudiy, Juz.11, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2008), h. 64.

hasilnya menurut yang ma'ruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya.¹⁸ Memproduktifkan tanah wakaf memang diperbolehkan, namun harus sesuai dengan syarat- syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam Islam.¹⁹ Hasil dari produksi tanah wakaf itu juga harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tanah wakaf yang dijadikan tempat pemakaman khususnya di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat dijadikan sebagai lahan pertanian, berbagai jenis tanaman seperti singkong, padi dan jagung. Karena di desa biasanya jarang ada penjaga dan pengurus khusus pemakaman, jika ada hanya karena kemauan dari orang tersebut. Berbeda dengan tempat pemakaman yang ada di kota-kota memang sudah ada pengurus tetap yang di gaji setiap bulannya. Pada studi kasus tanah pemakaman ini memfokuskan pada pengurus yang memperoleh hasil dari pengelolaan tanah pemakaman yang dijadikan lahan pertanian.

Pembahasan penggunaan tanah pemakaman sebagai lahan pertanian ini sangat menarik untuk dikaji karena hasil penjualan pada penanaman lahan pemakaman ini hanya digunakan oleh pengurus saja dan untuk makam- makam yang lama hanya ditandai kayu dan botol juga sudah rata tidak terlihat lagi, sehingga menimbulkan pertanyaan dan protes dari beberapa masyarakat yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang tanah pemakaman yang dijadikan sebagai lahan pertanian dengan menekankan pada hasil dari pengelolaan tanah pemakaman yaitu sebagai tanah wakaf apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman

¹⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2005), h. 136.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 32.

Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian perspektif hukum Islam dan hukum Positif di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman umum yang dijadikan sebagai lahan pertanian di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian perspektif hukum Islam dan hukum Positif di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya dimasyarakat.
- b. Secara praktis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya dalam mengkaji suatu pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman dengan konsep hukum Islam dan hukum Positif untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dilapangan.²⁰

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis komperatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan cara membuat perbandingan.²¹ Dalam penelitian dideskripsikan tentang bagaimana penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman yang dijadikan sebagai lahan pertanian menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Pengantar Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), hal. 47.

²¹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47.

3. Sumber dan Jenis Data

Fokus penelitian ini yaitu pada penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian yang terkait dengan masalah hasil dari pengelolaan tanah tersebut apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum Positif. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²² Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari masyarakat pengurus tanah pemakaman umum di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli.²³ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku- buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang

²² *Ibid.*, h. 49.

²³ *Ibid.*

ada pada objek penelitian.²⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme pengelolaan tanah pemakaman yang ada di masyarakat desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²⁵ Pada praktiknya disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak yang mengurus dan mengelola tanah pemakaman sebagai lahan pertanian di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat.

c. Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengelola tanah pemakaman yang dijadikan sebagai lahan pertanian di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara berjumlah 1 orang. Penulis berupaya menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengelolaan dan hasil penanaman di tanah pemakaman tersebut.

Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus pemakaman yang mengelola tanah pemakaman sebagai lahan pertanian, untuk menambah informasi juga dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat desa.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 199.

²⁵ *Ibid.*, h. 198.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian perspektif hukum Islam dan hukum Positif yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.²⁶ Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan pengelolaan tanah pemakaman. Tujuannya dapat dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif, yaitu agar memberikan kontribusi keilmuan serta menjawab pertanyaan masyarakat desa tersebut.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah- kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁷ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hasil dan pengelolaan pemakaman umum sebagai lahan pertanian. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²⁶ *Ibid.*, h. 278.

²⁷ *Ibid.*, h. 281.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

Secara etimologi kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab, yaitu : *waqafa*, *yaqifu*, *waqafan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, memperlihatkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.²⁸ Sedangkan menurut istilah adalah menghentikan perpindahan hak milik atas sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, hak perorangan, keluarga maupun lembaga untuk dipergunakan bagi kepentingan umat di jalan Allah SWT.²⁹

Sedangkan menurut pengertian terminologi, dikemukakan oleh Abi Yahya Zakaria Al-anshari :

و شَرَعًا حَبْسُ مَا لِي بِمُكِنِّ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ فِي رَبِّتِهِ
عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ .³⁰

“Wakaf menurut syara’ yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap

²⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), h. 23.

²⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* , Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 168.

³⁰ Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathu Al Wahab*, Juz I, (Indonesia: Darul Ihya’i Al Kuu Al Arabiyah, 1989), h. 256.

dengan cara memutuskan penggunaanya, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah (tidak haram) yang ada”.

Wakaf adalah suatu penetapan bersifat abadi memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan seseorang atau bersifat keagamaan atau tujuan amal.³¹ Adapula yang mendefinisikan wakaf dengan : “ Menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT” sebagaimana terdapat didalam *mausu'ah Fiqih Umar bin Khattab*.³² Sedangkan menurut para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf ;

- a. Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbang manfaat”.³³
- b. Menurut Imam Maliki bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³⁴
- c. Menurut Syafi'i dan Hambali, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan

³¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1984), h. 3.

³² Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 490.

³³ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.

³⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2014), h. 7.

wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinikan wakaf adalah: 'Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)'.³⁵

- d. Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.³⁶

Dasar hukum disyari'atkannya wakaf dalam Islam, sebagaimana disebutkan di dalam al- Qur'an dan Al-Hadis.

- 1) Q. S. Al-Hajj (22) : 77

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

³⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 3.

³⁶ *Ibid*, h. 4.

“dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”.³⁷

Ayat di atas Allah memerintahkan berbuat kebajikan agar mendapat atau memperoleh kemenangan, yakni dengan harta, dengan lidah dan dengan nyawa. Infak di jalan Allah SWT diantaranya wakaf.

2) Surat Al- Baqoroh (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.³⁸

Menurut ulama fiqih bahwa dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta yang diperoleh dari hasil usaha kepada Allah, yakni dengan menyalurkan sebagian harta untuk kepentingan umum atau umat Islam. Misalnya dengan mewakafkan harta di jalan Allah yang pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik.

3) Surat Ali- Imron ayat (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 272.

³⁸ *Ibid*, h. 35.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf yang merupakan amal jariyah.

4) Surat Al- Baqoroh (2) : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ
 يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa infak yang dikeluarkan oleh seseorang merupakan bukti dari pada kesempurnaan imannya. Menginfakkan harta yang disenangi untuk orang lain atau kepentingan umum masyarakat tersebut adalah wakaf. Orang yang

³⁹ *Ibid.*, h. 62.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 44.

mewakafkan harta kekayaan yang disenangi dan dimuliakan adalah sebagai wujud dari pada kesempurnaan kebaktian seseorang terhadap Allah SWT.

Ayat Al- Qur'an yang berkaitan secara umum dengan wakaf, terdapat pula beberapa hadis Nabi SAW yang konteksnya berhubungan pula dengan masalah wakaf, yaitu:

1) Hadis Riwayat Muslim :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَا قَطُ هُوَ نَفْسٍ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ عُمَرُ ، إِنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُؤْتَى وَلَا تُؤْتَى. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.⁴¹ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khibar, kemudian menghadap kepada Rasullallah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasullallah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasullallah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian

⁴¹ Al-Imam Abiy Zakaria Yahya Ibnu Syarofi Al-Nawawiy Al-Damsyiqiy, *Syarh Shahih Muslim*, ditahqiq oleh Imad Zakiy Al-Barudiy, Juz.11, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2008), h. 64.

umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya pada orang- orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.(H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa sahabat Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya dari tanah tersebut kepada orang- orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil serta tamu, hal ini berarti bahwa fungsi tanah tersebut merupakan tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dengan demikian tanah tersebut dinamakan tanah wakaf.

2) Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْدَهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ، جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.^{٤٢}

(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa rasulullah SAW telah bersabda: Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang senantiasa mendo’akan orang tuanya”. (H.R. Muslim)

⁴² *Ibid.*, h. 63.

Hadis ini jelas bahwa setiap manusia yang telah meninggal dunia akan terputus amalnya, kecuali tiga hal yaitu : Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya.

Beberapa hadis di atas dapat dijadikan sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam. Wakaf merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui harta kekayaan yang dimilikinya, yakni dengan melepaskan sebagian harta benda itu untuk kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam berwakaf terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi,⁴³ diantaranya yaitu:

- a. Rukun Wakaf
 - 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
 - 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
 - 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf)
 - 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)
- b. Syarat Wakaf
 - 1) *Wakif* adalah Orang yang mewakafkan, disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya.⁴⁴ Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:
 - a) Merdeka

⁴³ Suparman Usman, *Op. Cit*, h. 32.

⁴⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 314

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.⁴⁵

b) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta yang lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (*idiot*), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.⁴⁶

c) Dewasa (*baligh*)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Dalam hukum perdata yang dimaksud orang dewasa adalah berusia 21 tahun penuh bagi yang belum pernah kawin. Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Op. Cit., h. 22.

⁴⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 23.

⁴⁷ *Ibid.*

d) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*), misalnya karena *taflis*, ataupun pemboros, menurut fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabaru'* tidak sah kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri.⁴⁸

2) *Mauquf Bih* (harta yang diwakafkan). Syarat sahnya harta wakaf yaitu:

- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwim*). Pengertian harta *mutaqawwam* (*al-mal-al-mutaqawwam*), Menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal bukan dalam keadaan darurat. Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.⁴⁹
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin dan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasannya (*ainunma 'lumin*), sehingga tidak menimbulkan persengketaan.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, h.24.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, Op. Cit., h. 27.

⁵⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), h. 86.

- c) Benda wakaf merupakan milik sempurna *wakif*. Karena itu, tidak sah wakaf terhadap harta yang belum menjadi milik sempurna *wakif*. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.⁵¹
 - d) Terpisah bukan milik bersama (*musya'*), milik bersama itu adakalanya dapat dibagi, juga adakalanya tidak dapat dibagi. Misalkan seseorang mewakafkan harta untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasannya.⁵²
- 3) *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf), maksud *mauquf 'alaih* adalah pihak yang dituju atau yang dimaksud dari wakaf. Untuk menghindari penyalahgunaan harta wakaf, maka *wakif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang digunakan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahli*), atau untuk fakir miskin, kepentingan umum (*waqf khairi*), yang jelas tujuannya untuk kebaikan mencari keridhoan Allah SWT dan mendekatkan diri padaNya.

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan ibadah *maliah* berbentuk *shadaqah jariyah* yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan. Selain itu wakaf juga merupakan amal yang mendekatkan diri kepada sang pencipta.

⁵¹ Rozalinda, *Op. Cit*, h. 26.

⁵² Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf, Op. Cit*, h.29.

Oleh karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.⁵³ Adapun syarat yang menerima wakaf adalah:

- a) Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi, jika dia tidak ada, misalnya mewakafkan sesuatu kepada orang yang akan dilahirkan, maka menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali wakaf tersebut tidak sah. Namun menurut Maliki sah.
- b) Hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki. Tidak sah memberi wakaf dan wasiat pada binatang. Adapun wakaf kepada masjid, madrasah dan rumah sakit, pada hakikatnya adalah wakaf kepada orang yang memanfaatkannya.⁵⁴
- c) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat-tempat minuman keras, dan para perampok.
- d) Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui. Jika seseorang mewakafkan kepada seorang laki-laki atau perempuan (tanpa disebut jelas siapa orangnya) batallah wakafnya.

Dipandang dari sisi tujuan terdapat perbedaan diantara para *faqih* mengenai jenis-jenis ibadah pada umumnya, disini apakah ibadah menurut pandangan Islam atautkah menurut keyakinan *wakif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*.

⁵³ *Ibid.*, h. 46.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 647.

- (1) Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan hukum Islam dan menurut keyakinan *wakif*. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.
- (2) Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan *wakif*. Sah wakaf muslim kepada semua *syi'ar* Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan *syi'ar-syi'ar* Islam.
- (3) Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim maupun non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam dalam masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.
- 4) *Sighat Waqf* (ikrar wakaf), merupakan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya.⁵⁵ Syarat- syarat lafal wakaf adalah:
 - a) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Demikian pendapat dari Jumhur fuqaha diantaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad. Menurut pendapat ini, tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*muaqat*). Tetapi Ulama Malikiyah berpendapat, wakaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali kepemilikannya. Walaupun demikian, menurut Malikiyah sesungguhnya *ta'bid* merupakan

⁵⁵ Rozalinda, *Op. Cit*, h. 30.

prinsip dasar *sighat* wakaf. Karena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya. Sementara itu, Abu Yusuf, Ulama Hanafiyah, berpendapat sah wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu.⁵⁶

- b) Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhur fukaha menyatakan, bahwa *sighat tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *sighat tanjiz*. Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang, misalnya, seseorang berkata “saya akan mewakafkan tanah saya tiga bulan yang akan datang”.⁵⁷ Dalam hal ini menurut Abu Hanifah, sesungguhnya pernyataan wakaf apabila disandarkan pada masa setelah kematian, maka wakafnya itu batal. Karena hal itu, dianggap wasiat dengan wakaf.
- c) Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim/ilzam*). Fukaha dikalangan Hanafiyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *sighat* yang tidak tegas (*ghairu jazim*), seperti pernyataan yang hanya mengandung janji-janji semata atau diiringi dengan *khiyar* syarat. Wakaf itu menurut jumhur ulama bersifat mengikat.

⁵⁶ Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah al-Waqf fi al-Islam Maqasid wa Qawaid*, (Iskandariyah: An-Nasyir al-Ma'arif, 1999), h. 250.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 251.

Wakif tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkan.⁵⁸

- d) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya, diungkapkan “*saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya*”, maka wakaf itu batal.
- e) Menyebutkan *mauquf ‘alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, *wakif* harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas.

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuannya, batas waktu, dan penggunaannya. Dibawah ini akan diuraikan penjelasan mengenai macam-macam wakaf.

a. Wakaf Berdasarkan Tujuannya

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi/umum*), adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan karena wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.⁵⁹
- 2) Wakaf keluarga (*khusus/dzurri*), yaitu wakaf yang diperuntukkan, kepada keluarga, keturunan, dan orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga *wakif* atau bukan, tanpa melihat apakah

⁵⁸ *Ibid.*, h. 252.

⁵⁹ Suparman Usman, *Op. Cit.*, h. 33.

kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.⁶⁰ Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh *wakif*.

- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*) apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- b. Wakaf Berdasarkan Batas Waktunya
- 1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk suatu barang yang sifatnya abadi seperti tanah, bangunan gedung beserta tanahnya ataupun barang yang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan serta mengganti jika ada kerusakan.
 - 2) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarnakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Berdasarkan Penggunaannya
- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, dan lain-lainnya.
 - 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶¹

⁶⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 118.

⁶¹ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khilafah, 2007), h. 161.

4. Kedudukan Dan Perubahan Wakaf

a. Kedudukan Wakaf

Diterangkan dalam kitab “Fiqh Sunah” sebagai berikut:

وَالْمَقْصُودُ بِالصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ "الوقف".⁶²

“yang dimaksud shadaqah jariyah adalah wakaf”

Ada pula para ulama mengartikan sedekah jariyah dengan wakaf, maka kedudukan wakaf dalam Islam adalah sebagai salah satu macam sedekah, dan sedekah ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sedekah lainnya hal ini dikarenakan pahala dari sedekah ini tidak terputus walaupun yang melakukan sudah meninggal dunia.

Menurut pandangan Al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa pemilik harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral.⁶³ Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga, secara moral harus diyakini bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial.

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah SWT. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan

⁶² Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunah*, Jilid XIV, (Bandung: Ma'arif, 1988), h. 157.

⁶³ Munzir Qahaf, *Op. Cit.*, h. 165.

ketentuan yang diatur oleh Allah SWT.⁶⁴ Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya”. (QS. Al-Maidah (5) : 120)

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan atau lembaga *nazhir*, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.

Pelaksanaan wakaf ini, misalnya seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik *wakif*, pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat banyak.

b. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya terhadap hak milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Perubahan wakaf dimaksud adalah yang tidak sesuai dengan kehendak *wakif* atau mengalihkan dari tujuan wakaf semula, seperti menjual harta wakaf, dan hasinya dialihkan kepada yang lain.⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, Op. Cit., h.68.

⁶⁵ *Ibid.*, h.80.

Pemanfaatan benda wakaf adalah dalam bentuk hasilnya. Misalnya, wakaf kebun yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, tanah sebagai pokok wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Sedangkan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan/masyarakat yang membutuhkan.

Pada suatu saat mungkin terjadi bahwa benda wakaf sudah tidak ada manfaat atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifatnya, memindahkan benda wakaf ketempat lain. Seperti contoh perubahan harta wakaf, Masjid yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, yang kemudian alat-alat bangunan masjid dijual, hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun masjid yang baru, atau dalam bentuk memindahkan masjid yang telah kehabisan jama'ah karena ada perubahan tata kota ke daerah lain yang masyarakat memerlukan Masjid.

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.⁶⁶

Namun di lain pihak benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud *wakif*, maka Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsauro dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf

⁶⁶ *Ibid.*, h. 81.

tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

5. Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Hukum Islam

Pada jaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana, saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, pasar dan lain-lain. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa Sultan (penguasa) selalu berusaha untuk mengenalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf.⁶⁷

Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan, dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan.

Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat, seperti bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 91.

Keberhasilan wakaf di negara-negara muslim seharusnya menjadi cerminan untuk menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf di Indonesia. Kalau dilihat dari jumlahnya, harta wakaf diseluruh tanah air terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, dan pekuburan yang rata-rata tidak produktif.⁶⁸ Untuk itu, keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif strategis untuk dikelola secara produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan Syari'at Islam dibawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan pemberdayaan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Pemberdayaan yang dimaksud membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, khususnya dunia perbankan yang mempunyai kekuatan dana untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini memerlukan dukungan dan komitmen oleh semua pihak seperti pemerintah, ulama, kaum professional, cendikiawan, pengusaha, arsitektur, perbankan, lembaga-lembaga bisnis, lembaga penjamin dan keuangan Syariah serta masyarakat umum, khususnya umat Islam diseluruh Indonesia.⁶⁹ Sehingga potensi wakaf akan mempunyai peranan yang cukup penting dalam tatanan ekonomi nasional, terlebih disaat Indonesia sedang mengalami krisis yang sangat memprihatinkan.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 97.

⁶⁹ *Ibid.*

B. Wakaf Menurut Undang-Undang Di Indonesia

1. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional dibentuklah undang-undang tentang

wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷⁰

Menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi benda wakaf, ditegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga perwakafan, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *nazhir* dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf bersekala internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan. Perlunya Badan Wakaf Indonesia tersebut karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada campur tangan Pemerintah

⁷⁰ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 29.

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf tersebut.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut juga ditampung berbagai usulan dari masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan wakaf, anantara lain perlunya pengawasan wakaf secara efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, juga perlunya pengawasan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh *wakif* agar tidak bertentangan dengan syariah Islam dan perlunya perlindungan terhadap para *mustahik* dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaksanaan dimasa yang akan datang lebih baik dan tertib administrasi dan manajemennya.

2. Unsur dan Syarat Wakaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.⁷¹

- 1) *Wakif* perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila:
 - a) Dewasa;
 - b) Berakal sehat;
 - c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d) Pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) *Wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi

⁷¹ Undang-Undang pengelolaan Zakat dan Wakaf, Op. Cit, h. 31.

sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- 3) *Wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya adalah kelompok orang yang mempunyai satu kesatuan atau merupakan suatu pengurus. *Nazhir* meliputi peseorangan, organisasi dan badan hukum.⁷²

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Warga negara Indonesia
 - b) Beragama Islam
 - c) Dewasa
 - d) Amanah
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
 - b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan.

⁷² *Ibid.*, h. 32.

- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, *nazhir* mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁷³ Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Jika larangan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi, yaitu sesuai dengan Pasal 67 Ayat (2); “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana

⁷³ *Ibid.*, h.33.

denda paling banyak Rp. 400.000,00 (empat ratus juta rupiah)”⁷⁴.

c. Harta Benda Wakaf

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah.⁷⁵ Harta benda wakaf dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah;
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan

⁷⁴ *Ibid.*, h.49.

⁷⁵ *Ibid.*, h.34.

- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁷⁶ Menurut Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat bukti kepemilikan atas harta benda wakaf. Selanjutnya, ikrar wakaf akan dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang memuat:

- 1) Nama dan identitas *wakif*
- 2) Nama dan identitas *nazhir*
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf
- 4) Peruntukan harta benda wakaf
- 5) Jangka waktu wakaf

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

⁷⁶ *Loc. Cit*, h.29.

- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf, jika dalam hal ini *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka *nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 untuk adanya wakaf tanah milik harus dipenuhi beberapa rukun dan syarat,⁷⁷ yaitu:

- 1) adanya orang yang *berwakaf* (*wakif*), sebagai subjek hukum wakaf tanah milik;
- 2) adanya benda yang *diwakafkan* (*mauquf*), yaitu tanah milik;
- 3) adanya penerima wakaf (*nazhir*);
- 4) adanya '*aqad atqu lafalz*' atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf alaih*).

Badan-badan hukum Indonesia yang bertindak sebagai *wakif* tersebut hanyalah badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.⁷⁸ Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut, badan hukum

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁷⁸ Rachmad Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81.

Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sesuai dengan pembatasannya meliputi:

- a) Bank yang didirikan oleh negara (bank negara) sepanjang untuk penunaian tugas-tugas dan usahanya yang tertentu serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya memerlukan tanah hak milik;
- b) Perkumpulan koperasi pertanian, yang luasnya tidak boleh lebih dari batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
- c) Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama sepanjang untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan;
- d) Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial sepanjang untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha sosial.

Percantuman secara terperinci syarat-syarat menjadi *Wakif* dimaksudkan untuk menghindari tidak sahnya perbuatan mewakafkan, baik karena adanya faktor intern (cacat atau kurang sempurna cara berfikir) maupun faktor eksteren karena merasa dipaksa orang lain.⁷⁹ Ketentuan-ketentuan ini berlaku juga bagi yayasan Indonesia yang bergerak dibidang keagamaan dengan penyesuaian persyaratan seperlunya sesuai dengan persyaratan subjek hukum tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini diperkenalkan adanya badan hukum disamping orang sebagai wakif. Hal ini tidak ditemui secara khusus dalam pembicaraan kitab fiqh Mengenai objek wakaf tanah milik diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997. Berdasarkan ketentuan tersebut,

⁷⁹ *Ibid.*

objek wakaf tanah milik harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.⁸⁰

Perbuatan mewakafkan suatu perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam, karenanya maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari sudut pemilikan. Selain itu, persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya atau terbawa-bawanya lembaga perwakafan ini untuk sering berhadapan dengan pengadilan yang dapat memerosotkan wibawa dan syariat agama Islam.

Tanah yang hendak diwakafkan juga terbatas pada tanah milik, berhubungan dalam perspektif hukum Islam, sifat atau tujuan perwakafan dimaksud untuk “mengekalkan” selama-lamanya harta benda atau manfaat harta benda seseorang sesuai dengan peruntukan wakafnya. Karena itulah tanah hak milik yang paling tepat dijadikan sebagai objek perwakafan tanah.

Dalam UUPA hanya hak milik yang mempunyai sifat yang penuh. Sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, hanyalah mempunyai jangka waktu yang terbatas, sehingga oleh karena itu pemegang hak-hak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan seperti halnya hak milik. Berhubungan dengan masalah perwakafan tersebut bersifat untuk selama-lamanya (abadi), maka hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan.

Seseorang yang mengelola wakaf disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, *Op. Cit.*

Nomor 28 Tahun 1977, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan wakaf, yang dinamakan dengan *nazhir*. Apabila *nazhir* tersebut perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang dan salah seorang diantaranya sebagai ketua.⁸¹ Kemudian jumlah *nazhir* perseorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Jadi jumlah *nazhir* dalam satu desa hanya ada satu orang. Sedangkan *nazhir* badan hukum jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah badan hukum yang ada dikecamatan.

Penentuan persyaratan dan jumlah *nazhir* dalam suatu daerah dimaksudkan agar pengurus, baik yang terdiri atas kelompok orang-orang maupun suatu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan untuk mengurangi benih-benih perselisihan disebabkan oleh banyak orang yang mengurus sesuatu hal atas benda yang sama. *Nazhir* harus di daftarkan pada kantor urusan agama setempat untuk mendapat pengesahan. Pendaftaran dan Pengesahan dimaksud untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan memudahkan pengawasan.⁸² Adapun kewajiban *nazhir* adalah:

- a) mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya.
- b) Memberikan laporan perubahan anggota *nazhir*, apabila ada salah seorang anggota *nazhir* maninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat lagi, tidak dapat melakukan kewajiban dan melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya.
- c) Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Rachmadi Usman, *Op. Cit.* h.85.

Urusan Agama Islam melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh *wakif* atau karena kepentingan umum.

- d) Mengajukan permohonan atas perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Agama dengan memberikan keterangan seperlunya tentang tanah penggantinya, apabila kepentingan umum menghendakinya.
- e) Melaporkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala sub Direktorat Agraria setempat, apabila terjadi perubahan status tanah wakaf atau perubahan penggunaannya untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
- f) Melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setiap satu tahun sekali, yaitu pada tiap akhir bulan Desember tentang hasil pencatatan tanah wakaf yang diurusinya, yaitu:
 - 1) Pencatatan tanah wakaf oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota;
 - 2) Pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal perubahan status tanah wakaf pengganti oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota;
 - 3) Pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.

Adapun hak-hak *nazhir* ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu menerima penghasilan dari tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen

Agama c.q. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih tanah wakaf.⁸³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pelaksanaan wakaf tanah milik harus dilakukan secara tertulis, artinya tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut ketentuan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan tersebut. Selanjutnya apabila di suatu Kabupaten/Kota, Kantor Departemen Agama belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota itu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di daerah tersebut.⁸⁴

⁸³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, *Op. Cit*,

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, h. 88.

3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka usaha meningkatkan manfaat harta wakaf agar menjadi harta yang bermanfaat serta menjadikan modal yang lebih produktif untuk kesejahteraan umat dan generasi yang akan datang, maka yang sangat butuh perhatian adalah *nazhir* atau pengelola, dan diharapkan peran yang profesional, sehingga dapat mengembangkan harta wakaf menjadi produktif. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan utama *nazhir* dalam menjalankan pengelolaan tanah wakaf, yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap harta tanah wakaf, serta sistem pengelolaannya.
- b) Pada umumnya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, menyerahkan terhadap orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, dan belum tentu yang diserahi mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola secara optimal.

Para *fuqaha* tidak mencantumkan *nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunah saja). Padahal dipundak *nazhir* inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan *nazhir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, disamping *wakif*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan

dan pengembangan benda wakaf secara produktif dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁸⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagai *nazhir*, *nazhir* berhak memperoleh pembinaan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatnya. Untuk keperluan itu dipersyaratkan, bahwa *nazhir* harus terdapat pada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia.⁸⁶ Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional *nazhir* wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum;
- b) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi;
- d) Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- e) Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf pada *nazhir* sesuai dengan lingkupnya;
- f) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 135.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 138.

Pembinaan terhadap *nazhir* wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Sementara itu, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nazhir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan harta benda wakaf dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.⁸⁷

Masa bakti *nazhir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia bila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Namun karena sesuatu halnya *nazhir* dapat diberhentikan dan diganti dengan *nazhir* lain apabila yang bersangkutan⁸⁸:

- 1) Meninggal dunia bagi *nazhir* perseorangan;
- 2) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *nazhir* organisasi atau *nazhir* badan hukum;
- 3) Atas permintaan sendiri;
- 4) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nazhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

⁸⁷ *Ibid.*, h. 139.

⁸⁸ Undang-Undang pengelolaan Zakat dan Wakaf, Op. Cit, h. 42.

- 5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian *nazhir* karena alasan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia, dengan ketentuan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* lain karena pemberhentian dan penggantian *nazhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara

Masa penjajahan Belanda berkisar tahun 1810, sebagian penduduk asli (Pribumi) Desa Gunung Raja adalah masyarakat lampung Sungkai yang berasal dari tiuh (Kampung) Kotanapal, Kecamatan Bunga Mayang saat ini yang struktur tanahnya berpasir tandus. Karena hal demikian, sebagian warganya mencari tempat untuk bercocok tanam yang bagus sehingga mencapai jarak berpuluh kilometer dari tempat tinggal mereka. Tibalah mereka di suatu wilayah yang memiliki tanah yang subur untuk bercocok tanam. Sejak saat itu orang-orang yang mencari tempat untuk bercocok tanam tersebut langsung menetap dan membuat rumah. Selama bercocok tanam dan bertani di daerah itu hasil panen yang didapat sangat memuaskan, sehingga para petani tersebut menjual sebagian dari hasil panennya. Dari hasil panen itu mereka bisa membangun rumah dikampungnya yaitu kotanapal tersebut.⁸⁹

Perniagaan masyarakat pada saat itu sampai wilayah Batavia (Betawi) sepulang dari berniaga di Batavia (Betawi) sepulang dari berniaga di Batavia masyarakat menamai daerah tersebut dengan sebutan Umbul Gunung Betawi. Diantara, masyarakat yang tinggal di Umbul Gunung Betawi tersebut ada yang bergelar Raja Lambung Gunung mengadakan pesta (Gawi) mengganti gelar

⁸⁹ Arsip Dokumen Desa, *Sejarah Desa Gunung Raja*, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, h. 3.

menjadi Suntan Tuan dan Umbul tersebut dibanton (diresmikan) menjadi Tiuh Gunung Raja pada tahun 1949.⁹⁰ Namun, pemerintahannya masih sebagai Padukuhan dari kampung (Tiuh) Kotanapal sedangkan jarak antara Gunung Raja dan Kotanapal adalah \pm 50 km. Tiuh Kotanapal sendiri terdiri dari Tiuh Adat diantaranya Tiuh Gedung Raja, sehingga nama Umbul Gunung Betawi dipadukan dengan nama Tiuh Gedung Raja menjadi Tiyuh Gunung Raja.

Pada tahun yang sama sekolah rakyat statusnya dinegerikan menjadi Sekolah Rakyat Negeri Gunung Raja. Pada tahun 1985 Pedukuhan Gunung Raja dijadikan desa persiapan yang dikepalai oleh Pjs. Hidayatul Amin. Pada tahun 1991 Desa Gunung Raja menjadi desa Definitif dengan calon tunggal yaitu Hidayatul Amin sampai dengan 1999.

a. Sejarah Singkat yang Menjadi Kepala Desa

Sejak tahun 1895-1985 desa Gunung Raja dipimpin oleh tokoh adat dan belum terdaftar secara pemerintahan, desa ini berjalan sesuai dengan adat yang ada, dengan wilayah yang cukup luas tergabung menjadi satu dusun yaitu dusun 1 (satu) desa Gunung Raja Kecamatan Bunga Mayang.⁹¹

Pada tahun 1986 dimasa kepemimpinan Hidayatul Amin terjadi pemekaran Kecamatan yaitu desa Gunung Raja masuk kedalam Kecamatan Sungkai Selatan dan pada saat ini juga terjadi pemekaran dusun yakni dari 1 (satu) dusun menjadi 6 (enam) dusun. Kemudian pada masa kepemimpinan Bai Riduan, SH. Terjadi pemekaran Kecamatan sehingga Desa Gunung Raja masuk ke Kecamatan Sungkai Barat, dan pada masa kepemimpinan sekarang karena setiap tahun penduduk desa Gunung Raja semakin bertambah

⁹⁰ *Ibid.*, h. 4.

⁹¹ *Ibid.*, h. 8.

sehingga dari 6 (enam) dusun berubah menjadi 7 (tujuh) dusun.⁹²

Tabel 1
Sejarah singkat yang menjadi Kepala Desa Gunung Raja

No	Nama Kepala Desa	Periode	Tahun	Keterangan
1	Suntan Raja Marga	1895-1905	10	
2	Suntan Bala Seribu	1905-1925	20	
3	Suntan Pukuk Karim	1925-1947	22	
4	Suntan Jimat	1947-1966	19	
5	Maryuni	1966-1985	19	
6	Hidayatul Amin	1985-1999	14	
7	Bai Riduan, SH.	1999-2015	16	
8	Syahri Yadi	2015 s/d Saat ini	-	

Sumber: Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

b. Letak Geografis Desa Gunung Raja

1) Letak Desa

Desa Gunung Raja merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang berada dalam Wilayah Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung utara. Desa

⁹² *Ibid.*, h. 10.

Gunung Raja adalah desa yang paling dekat dengan Ibu Kota Kecamatan yaitu Sinar Harapan.⁹³

2) Orbitasi Desa.

Dilihat dari jarak jangkauan (Orbitasi) Desa dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan ± 4 KM
- b) Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Lampung Utara adalah ± 41 KM
- c) Jarak dengan Ibu Kota Propinsi Lampung ± 193 KM

3) Batas Desa.

Adapun letak Desa Gunung Raja dilihat dari segi batas-batas Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya
- 2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Negeri Sakti
- 3) Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Kubu Hitu
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Gunung Labuhan

c. Jenis Sifat Tanah (Tofografis)

Pada umumnya Desa Gunung Raja merupakan daratan dan sedikit mempunyai rawa, tanahnya hitam kemerah-merahan dan sebagaian cadas putih. Luas Desa Gunung Raja seluruhnya ± 1598 Ha dan dilihat dapat dirinci sebagai berikut :

⁹³ *Ibid.*, h. 11.

Tabel 2
Luas desa menurut penggunaan tanah

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)	Keterangan
1	Pemukiman/Pekarangan	457 ha	
2	Sawah - Tekhnis - ½ Tekhnis - Tadah Hujan - Sawah Pasang Surut	128 ha 96 ha 28 ha 120 ha	
3	Perkebunan	578 ha	
4	Hutan	120 ha	
5	Rawa	62 ha	
6	Waduk/danau	2 ha	
7	Kuburan	3 ha	
8	Tanah Masjid	4 ha	

Sumber: Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

d. Keadaan Penduduk Desa Gunung Raja

Pada akhir bulan Oktober 2017 jumlah penduduk Desa Gunung Raja adalah sebagai berikut⁹⁴:

Tabel 3
Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	93	214	185	399
2	Dusun II	67	141	137	278
3	Dusun III	78	156	132	288
4	Dusun IV	65	131	152	283
5	Dusun V	97	203	219	422
6	Dusun VI	75	147	135	282
7	Dusun VII	52	98	117	215
Jumlah		527	1090	1077	2167

Sumber: Data Penduduk Desa Gunung Raja Terbaru Tahun 2017

⁹⁴ Data Penduduk Desa Gunung Raja Terbaru Tahun 2017

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Desa Gunung Raja memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana pemerintahan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sarana umum.⁹⁵

1) Pemerintahan

Pemerintahan desa membawahi Kepala Dusun dan Kepala Dusun membawahi beberapa Rukun Tetangga (RT). Desa Gunung Raja mempunyai tujuh dusun dan enam belas Rukun Tetangga.

2) Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Gunung Raja mempunyai Masjid dan Mushola di tiap dusun, yaitu:

Tabel 4
Tempat Ibadah

No.	Nama Dusun	Tempat Ibadah				
		Masjid	Musholla	Gereja	Pure	Wihara
1	Dusun I	1	1	-	-	-
2	Dusun II	1	-	-	-	-
3	Dusun III	1	-	-	-	-
4	Dusun IV	1	-	-	-	-
5	Dusun V	1	1	-	-	-
6	Dusun	1		-	-	-

⁹⁵ Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa)

	VI					
7	Dusun VII		1	-	-	-
Jumlah		5	2	-	-	-

Sumber: Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 5
Agama/Kepercayaan

No	Agama/Kepercayaan	Jumlah/Orang	Keterangan
1	Islam	2.143 orang	-
2	Kristen	22 orang	-
3	Hindu	-	-
4	Budha	2 orang	-
JUMLAH		2.167 orang	

Sumber: Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

3) Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Gunung Raja mempunyai sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Dasar (SD).

Tabel 6
Taman Kanak-kanak

No	Nama Sekolah	Jumlah Murid		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	TK Darmawanita	20	25	45

2	MIS.Darul Ulum	5	10	15
---	----------------	---	----	----

Sumber: Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 7
Sekolah Dasar (SD)

No.	Nama Sekolah	Jumlah Murid			Ket.
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	SDN 1 Gunung Raja	98	102	200	

Sumber: Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

4) Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Gunung raja mempunyai PKD ditingkat desa dengan satu orang Bidan Desa.

Tabel 8
Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Posyandu	-
3	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
4	Tempat Praktek Bidan	1

JUMLAH	2
---------------	----------

Sumber: Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 9
Tenaga Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Jumlah Dokter Umum	-
2	Jumlah Para Medis	-
3	Jumlah Dukun Bersalin Terlatih	2 orang
4	Bidan	1 orang
5	Perawat	2 Orang
6	Dukun Pengobatan Alternatif	1 Orang
JUMLAH		6 Orang

Sumber: Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

5) Sarana dan Prasarana Umum

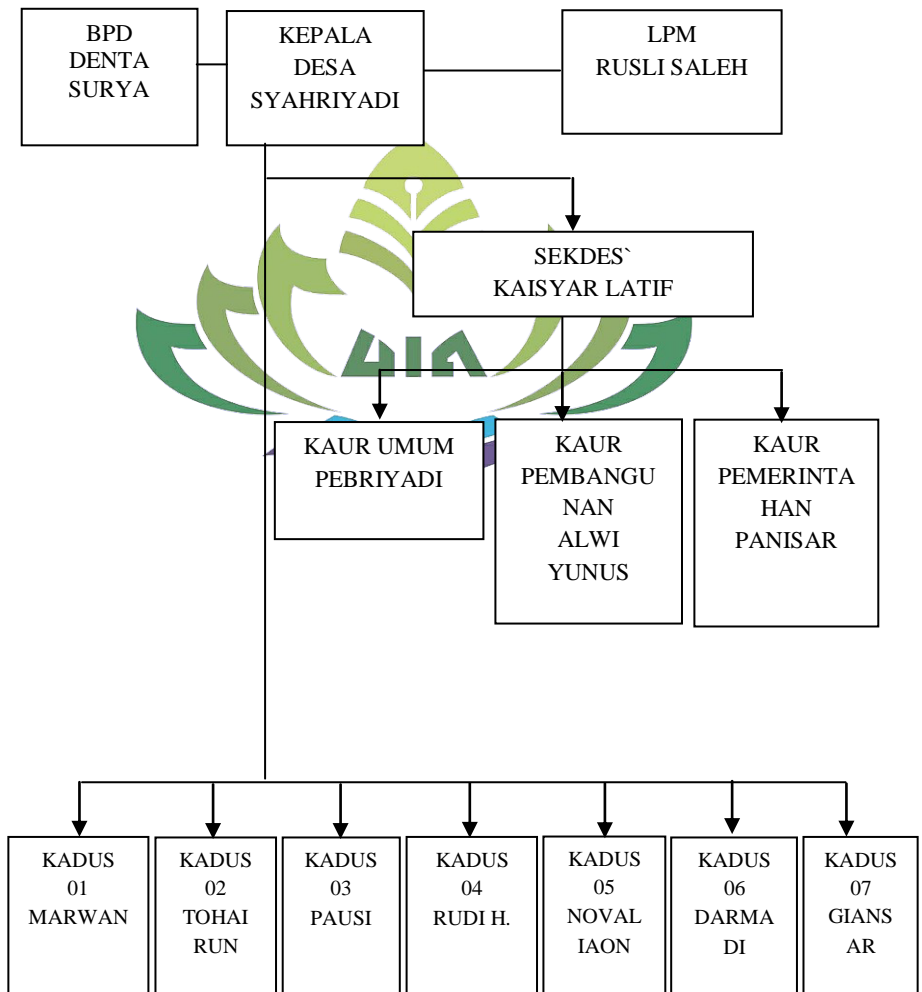
Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Gunung Raja, meliputi perdagangan dan kesehatan. Sarana prasarana dibidang kesehatan mempunyai Puskesmas pembantu dan praktek Bidan dengan kondisi baik. dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).⁹⁶

Jalan dalam desa Gunung Raja terdiri dari jalan Desa dan jalan RT. Beberapa ruas jalan di desa sudah beraspal dan onderlagh, namun ada jalan makam

⁹⁶ *Ibid.*

bahkan masih ada beberapa ruas jalan tanah. Pembangunan jalan tersebut sudah dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2016-2021.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA GUNUNG RAJA



f. Gambaran Pelayanan

Gunung Raja yang mengutamakan pada pembangunan masyarakat dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala desa dan sekertaris desa dibantu kepala urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, pembangunan ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat yang Membutuhkan.

2. Sejarah Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum di Desa Gunung Raja

Tanah pemakaman umum di dusun 3 (tiga) desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka. Tanah ini milik keluarga bapak Tayib yaitu salah satu jугaran tanah yang ada di dusun ini, hampir separoh tanah yang ada di dusun 3 (tiga) ini milik keluarga bapak Tayib.⁹⁷

Pada masa kepemimpinan Hidayatul Amin yakni kepala desa pertama tahun 1985-1999 terjadilah pemekaran dusun dari 1 (satu) dusun menjadi 6 (enam) dusun. Karena wilayah dusun 3 (tiga) tempatnya sangat

⁹⁷ Wawancara Bapak Zuhri (Tertua di Kampung, Dusun III Gunung Raja), Sabtu 25 November 2017.

strategis tetapi masih sedikit penduduknya, sehingga menyebabkan banyak warga dari dusun yang di pedalaman pindah ke dusun 3 (tiga).⁹⁸ Pada waktu itulah banyak tanah milik keluarga bapak tayib dijual kepada para warga yang pindah untuk tempat mereka membangun rumah dan bercocok tanam.

Banyak tanah keluarga Bapak Tayib yang terjual khususnya yang di pinggir jalan umum. Namun ada sebidang tanah yang letaknya di pinggir jalan umum juga tidak dijualkan oleh keluarga Bapak Tayib yaitu tepatnya di belakang Masjid An, Nurminah. Tanah ini cukup luas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ pada awalnya tanah ini adalah berisi pohon jati, sengon dan bambu, digunakan oleh pemilik untuk pemakaman keluarga. Tetapi karena tanah ini letaknya strategis dan cukup luas, berada di tengah masyarakat tepatnya dibelakang Masjid An, Nurminah dusun III, sehingga ketika ada warga desa yang meninggal meminta izin kepada pemilik tanah untuk dimakamkan ditanah tersebut.⁹⁹

Seiring dengan bertambah banyaknya penduduk di dusun 3 (tiga) dan banyak pula warga yang meninggal meminta izin untuk dimakamkan di tanah tersebut. Melihat akan banyaknya warga yang menumpang untuk dimakamkan ditanah ini, akhirnya pemilik tanah mewakafkan tanah tersebut sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU).

⁹⁸ Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, *Op. Cit*, h. 7.

⁹⁹ Wawancara Bapak Dewa Ratu (Tertua di Kampung, Dusun III Gunung Raja), Sabtu 25 November 2017.

B. Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian di Desa Gunung Raja

Tempat Pemakaman Umum di dusun 3 (tiga), Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara cukup luas yaitu $\pm 7.500 \text{ M}^2$, selain berisi pemakaman tanah ini masih berisi pohon jati, sengon dan bambu. Pada tahun 2000 (dua ribu) karena tanah tersebut sudah diwakafkan untuk pemakaman umum dan dari tahun ke tahun pemakaman ditanah tersebut semakin bertambah, sehingga pohon jati dan sengon atas persetujuan masyarakat ditebang dan dijual, uang hasil penjualan kayu tersebut diinfakkan untuk Masjid.

Disebabkan karena tanah tersebut dijadikan Tempat Pemakaman Umum, tetapi tidak ada penjaga dan pengurus pemakaman ini secara khusus, Melihat keadaan ini ada salah satu warga yang rumahnya dekat dengan pemakaman itu berkenan menjaga dan membersihkan TPU tersebut. Pohon bambu yang masih tersisa juga ditebangi dan dibersihkan oleh pengurus pemakaman itu. Pada tahun 2013 dan atas persetujuan beberapa masyarakat di dusun 3 (tiga) terutama yang rumahnya disekeliling pemakaman, pengurus pemakaman meminta izin untuk menanam tanah pemakaman itu dengan ditanami singkong, sebelum menanam pengurus mengatakan hasil penjualannya nanti ia akan infak ke masjid dan sisanya dianggap sebagai imbalan dalam mengurus dan membersihkan TPU tersebut.

Penanaman Tanah Pemakaman Umum ini sudah berlangsung dengan persetujuan beberapa warga yang ada di dusun III ini, pada tahun pertama pengurus menanam singkong dilahan ini ia mendapatkan hasil panen yaitu ± 8 ton singkong yang dijual dengan harga Rp.1000 per-kg sehingga pengurus memperoleh hasil Rp.8.000.000 pengurus mengatakan ia berinfak ke masjid sebesar Rp.

500.000.¹⁰⁰ tetapi setelah satu kali panen tahun 2014 ada beberapa warga yang protes karena banyak pemakaman lama yang hanya ditandai kayu dan botol itu sudah rata, sehingga banyak keluarga yang ingin berziarah tapi tidak menemukan tempat makam keluarganya. Beberapa warga juga tidak menyetujui jika hasil dari penanaman singkong ini pengurus hanya berinfak sekedarnya untuk masjid karena tanah pemakaman yang ditanami ini cukup luas.

Pada saat itu pengurus sempat berhenti menanam singkong ditanah pemakaman tersebut selama satu tahun, namun menurut masyarakat yang awalnya menyetujui penanaman singkong dilahan pemakaman ini, lebih baik pengurus menanam lagi makam tersebut agar makam tersebut terurus dan bersih. Sehingga atas persetujuan beberapa warga yang ada disekeliling pemakaman itu pada tahun 2016 ia kembali menanam tanah pemakaman itu dengan singkong dan itu berlangsung sampai sekarang.



¹⁰⁰ Wawancara Bapak Samsul (Pengurus Pemakaman Umum, Dusun III Gunung Raja), Minggu 26 November 2017.



BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah diuraikan beberapa pembahasan wakaf menurut hukum Islam dan hukum Positif tentang wakaf pada BAB II, dan berdasarkan hasil penelitian lapangan berkenaan dengan praktik penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara maka pada bab ini data-data yang didapat akan dianalisa sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dalam BAB I.

A. Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam

Tanah Pemakaman Umum adalah termasuk jenis tanah wakaf yang pada dasarnya tanah wakaf itu memang bisa diproduktifkan yaitu seorang *nazhir* yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Dalam hal ini Islam telah mengatur tata cara perwakafan dan pengelolanya, namun yang terjadi di desa Gunung Raja belum memenuhi unsur dan syarat wakaf yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.

Tanah pemakaman (tanah wakaf) di desa Gunung Raja ini belum terdaftar di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sehingga belum ada pengurus (*nazhir*) yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang ada, akibatnya ada beberapa tanah wakaf yang digunakan berbeda dari peruntukan tanah wakaf yang diikrarkan oleh *wakif*. Pada dasarnya terhadap tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Perubahan wakaf dimaksud adalah pemanfaatan atau mendayagunakan harta wakaf yang tidak

sesuai dengan kehendak *wakif* atau mengalihkan dari tujuan wakaf semula.¹⁰¹

Namun di lain pihak benda wakaf yang tidak terurus atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud *wakif*, maka Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.¹⁰²

Menurut penulis dan berdasarkan teori, tanah pemakaman boleh saja ditanami singkong selagi tidak merusak pemakaman yang ada, dan hasil dari penanaman tanah pemakaman ini digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, sarana ibadah, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial. pengelola (*nazhir*) boleh mengambil hasil dari pengelolaan tanah tersebut secukupnya.

Namun yang terjadi di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat pengelola (*nazhir*) melakukan kesalahan yaitu tanah makam yang hanya ditandai kayu dan botol itu sudah rata karena tertanam singkong, dan hasil pengelolaan tanah pemakaman (tanah wakaf) tersebut banyak diambil oleh pengelola. Sehingga menimbulkan protes dari beberapa warga yang tidak ikut menyetujui dalam penanaman singkong ditanah pemakaman tersebut.

¹⁰¹ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khilafah, 2007), h. 156.

¹⁰² *Ibid.*, h. 158.

B. Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Positif

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi benda wakaf, ditegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan.¹⁰³ Dalam pelaksanaan wakaf juga harus memenuhi rukun dan syaratnya agar suatu saat tidak menimbulkan kelasahan dalam mengelolanya.

Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 dijelaskan wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, yaitu adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.¹⁰⁴ Dan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 untuk adanya wakaf tanah milik harus dipenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu:

- 5) adanya orang yang *berwakaf (wakif)*, sebagai subjek hukum wakaf tanah milik;
- 6) adanya benda yang *diwakafkan (mauquf)*, yaitu tanah milik;
- 7) adanya penerima wakaf (*nazhir*);
- 8) adanya *'aqad atau lafalz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf alaih*).¹⁰⁵

¹⁰³ Rachmad Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 58.

¹⁰⁴ Anggota IKAPI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 31.

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Seseorang yang mengelola wakaf disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan wakaf, yang dinamakan dengan *nazhir*.¹⁰⁶ Apabila *nazhir* tersebut perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang dan salah seorang diantaranya sebagai ketua. Kemudian jumlah *nazhir* perseorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Jadi jumlah *nazhir* dalam satu desa hanya ada satu orang. Sedangkan *nazhir* badan hukum jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah badan hukum yang ada dikecamatan.

Tanah wakaf di desa Gunung Raja ini belum terdaftar di PPAIW sehingga tidak ada *nazhir* yang mengelola tanah wakaf secara khusus, dan menyebabkan orang yang belum paham tentang pengelolaan dan peruntukan harta benda wakaf memanfaatkannya sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengelolaannya.

Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 44 Ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

¹⁰⁶ *Ibid.*

- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.¹⁰⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) dan (2) pengurus/pengelola harta wakaf tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan perubahan inipun dilakukan jika tanah wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun yang terjadi di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat tanpa menghilangkan fungsi utama yaitu sebagai pemakaman tetapi tanah tersebut dikelola juga sebagai lahan pertanian dan ini juga sudah mendapat persetujuan dari beberapa warga yang ada di desa tersebut.

Menurut penulis boleh-boleh saja tanah pemakaman tersebut digunakan sebagai lahan pertanian, namun jangan sampai merusak fungsi utamanya yaitu sebagai tempat pemakaman umum. pengurus/pengelola juga harus meminta izin kepada seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut, karena tanah ini diwakafkan untuk masyarakat umum yang ada di desa Gunung Raja bukan hanya beberapa warga saja. Seharusnya jika tanah tersebut sudah terdaftar di PPAIW pengurus/pengelola harus meminta izin terlebih dahulu kepada Badan Wakaf Indonesia melalui PPAIW setempat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan tanah tersebut.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 juga menjelaskan bahwa untuk hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut Nazhir (pengelola) dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta

¹⁰⁷ Undang-Undang pengelolaan Zakat dan Wakaf, Op. Cit, h. 41.

benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.¹⁰⁸ dan sisanya digunakan untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan dan kesejahteraan masyarakat umum di desa tersebut.



¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 33.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanah Pemakaman Umum (Tanah Wakaf) di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dikelola oleh salah satu warga di desa tersebut dengan ditanami singkong. Tanah ini belum terdaftar di PPAIW sehingga belum ada *nazhir* yang mengurus dan mengelola secara khusus, menyebabkan warga yang belum paham dengan pengelolaan tanah wakaf mengelolanya dan menyebabkan kesalahpahaman antar warga.
2. Menurut hukum Islam penggunaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian itu diperbolehkan selama tidak merusak fungsi utamanya yaitu sebagai tempat pemakaman, dan untuk hasil dari pengelolaan tanah digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, sarana ibadah, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial. Sedangkan menurut Hukum Positif/Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) dan (2) pengurus/pengelola harta wakaf tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan perubahan inipun dilakukan jika tanah wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun yang terjadi di desa Gunung Raja, Kabupaten Lampung Utara tanpa menghilangkan fungsi utama yaitu sebagai pemakaman tetapi tanah tersebut dikelola juga sebagai lahan pertanian dan ini juga sudah mendapat persetujuan dari beberapa warga yang ada di desa. Jadi pengelola boleh saja menggunakan tanah pemakaman tersebut sebagai lahan pertanian, tetapi pengelola harus

meminta izin terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat desa, karena tanah pemakaman ini diwakafkan untuk masyarakat desa. Seharusnya jika tanah ini sudah terdaftar di PPAIW, pengurus/pengelola tanah pemakaman harus mendapatkan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia melalui PPAIW setempat. Dan untuk hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut pengurus/pengelola boleh mengambil hasilnya 10% dari hasil bersih pengelolaan tanah tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan tanah-tanah wakaf yang ada di desa-desa dan mendaftarkannya ke Badan Wakaf Indonesia melalui PPAIW setempat, agar ada nazhir profesional yang mengelola tanah wakaf tersebut dengan baik dan hasilnya pun bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat umum, serta tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di desa.
2. Jika masyarakat Gunung Raja tidak semua meyetujui pengelolaan tanah pemakaman yang ditanami singkong ini, sebaiknya masyarakat desa Gunung Raja mencari solusi lain agar makam tersebut terjaga dan bersih, yaitu dengan bermusyawarah membentuk penjaga/pengurus pemakaman secara khusus dan masyarakat membayar uang penjagaan dan kebersihan pemakaman kepada pengurusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqy, Muhammad Fuad. *Sunah Ibnu Majah*, Juz II. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Abdurrahman. 1984. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Alumni.
- Al-Alabij, Adijani. 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. 2008. *Ringkasan Shohih Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya. 1989. *Fathu Al Wahab*, Juz I. Indonesia: Daru Ihya'i Al Kuu Al Arabiyah.
- Anggota IKAPL. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsip Dokumen Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungakai Barat Kabupaten Lampung Utara.
- Data Penduduk Desa Gunung Raja Terbaru Tahun 2017.
- Daud Ali, Mohammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI. 1996. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra
- , 2005. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

-----, 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

-----, 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Mushaf Sahmalnour.

-----, 2014. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1997. *Ensiklopedia Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Hadi, Sutrisno. 1985. *Pengantar Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Irwantoni. 2009. *Buku Daras: Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Puskima Fakultas Usuluddin.

Ja'far, Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Permatanet.

Kamaluddin Imam, Muhammad. 1999. *Al-Washiyah al-Waqf fi al-Islam Maqasid wa Qawaid*. Iskandariyah: An-Nasyir al-Ma'arif.

M. Attoillah. 2014. *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama. Bandung: Yrama Widya.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Muslim Al-Hajj, Imam Abi Al-Husain. 1994. *Shahih Muslim*, Juz 6. Mesir: Dar Al-Hadits Al-Qahirah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa.

-----, 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khilafah.

Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa).

Ropiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2016. *Fikih ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 1988. *Terjemahan Fikih Sunah*, Jilid XIV. Bandung: Ma'arif.

Salim, Peter, dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Pers Jakarta: Modern English.

Suhaini, Masrap. 1993. *Terjemahan Buluqul Maram*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Usman, Rachmad. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

